

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Hariri

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence the quality of the financial statements of the regional government of Sampang District. In this study, there are three independent variables consisting of the Internal Control System (X1), Utilization of Accounting Information Systems (X2) and Human Resource Competence (X3), while the dependent variable is the Quality of the Financial Statements of the Regional Government of Sampang District (Y). The sample in this study were employees of the finance and accounting department at the Regional Work Unit Service (SKPD) in Sampang District. Data collection technique is by distributing questionnaires and measured using a Likert scale. The data analysis method in this study used multiple linear regression using SPSS. The results of the study show that simultaneously the variables of the Internal Control System, Utilization of Accounting Information Systems and Human Resource Competence have a significant effect on the Quality of the Financial Reports of the Regional Government of Sampang District. While partially the Internal Control System and Accounting Information System Utilization variables have a significant positive effect on the Quality of the Financial Statements of the Regional Government of Sampang District, while the Human Resource Competency variable has no effect on the Quality of the Financial Statements of the Regional Government of Sampang District.

Keywords: *Financial Statements of the Regional Government, Internal Control System, Utilization of Accounting Information Systems and Human Resource Competence*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pengelolaan keuangan daerah. Bentuk laporan pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah suatu bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPD harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2021, BPK masih menemukan kelemahan pengendalian intern dan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak mempengaruhi secara material kewajaran penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut: 1. Pendapatan hibah langsung tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah

(RKUD) belum dicatat secara tertib; 2. Pengelolaan belanja hibah kepada masyarakat pada empat SKPD tidak sesuai ketentuandan terdapat kekurangan volume hasil pekerjaan; 3. Kekurangan volume atas pelaksanaan paket pekerjaan Belanja Tak Terduga pada dua SKPD (<https://jatim.bpk.go.id>).

Laporan keuangan yang berkualitas yaitu memenuhi beberapa karakteristik ialah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa proses penyusunan laporan keuangan merupakan suatu proses yang terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan staf akuntansi yang baik dan kualitas maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan suatu laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut (Udiyanti dkk, 2014).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada suatu tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan suatu keyakinan memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain Sistem Pengendalian Internal, hal yang mendasar dan penting di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Informasi Akuntansi. Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, sistem informasi akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan suatu akuntabilitas dan meningkatkan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkompoten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas. Begitu juga dalam entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas maka dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, Akuntansi keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradono dan Basukianto (2015), Yuliani dan Agustini (2016), Mulia (2016), Pramudityo (2017) dan Sutrisno (2017) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hanifa (2016), Yuliani dan Agustini (2016), Pramudityo (2017) dan Dasmaran (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Yuliani dan Agustini (2016), Pramudityo (2017) dan Mulia (2018) menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI di Provinsi Jawa Timur, maka peneliti perlu mengkaji secara mendalam pada salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Pemerintah Kabupaen Sampang. Pengkajian dilakukan terbatas pada beberapa penyebab rendahnya kualitas laporan pemerintah daerah antara lain sistem pengendalian internal, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan, dan kompetensi sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk menganalisis besarnya pengaruh masing-masing terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah sebagai berikut: “Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah

ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Sistem pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberi keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan suatu pemerintah daerah yang tercermin dari keteladanan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya perundang-undangan.

Tujuan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 bahwa pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

H1 : Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Sampang.

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah dengan penerapan sistem informasi akuntansi tersebut sesuai dengan BPKAD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Meuthia, 2008). Sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah suatu sistem pengelompokan, pencatatan, dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan.

H2 : Apakah Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Sampang.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Memiliki Sumber Daya Manusia adalah keharusan bagi sebuah organisasi/instansi, untuk pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan, workshop, seminar dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem informasi akuntansi yang ada. Sumber daya manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Menurut Widodo (2001) dalam Mulia (2018) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

H3 : Apakah Pemanfaatan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Sampang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *explanatory research* (penelitian penjelasan) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017) “*explanatory research* yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang lain.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan pada Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sampang.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan memberikan kuesioner kepada responden. Menurut Sugiyono (2017) “Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawab”. Kuesioner dalam penelitian ini diukur menggunakan skala likert 4 poin.

Metode analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh sebanyak 45 responden, dan yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian yaitu pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan daerah Kabupaten Sampang.

HASIL PENELITIAN

A. Statistik Deskriptif

Tabel 1 Statistik Deskriptif

| Descriptive Statistics | | | | | |
|--|----|---------|---------|--------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Sistem Pengendalian Internal | 45 | 2.00 | 4.00 | 2.6667 | .56408 |
| Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi | 45 | 2.00 | 4.00 | 2.6000 | .53936 |
| Kompetensi Sumber Daya Manusia | 45 | 1.00 | 4.00 | 2.5333 | .58775 |
| Kualitas Laporan Keuangan | 45 | 2.00 | 4.00 | 2.8667 | .50452 |
| Valid N (listwise) | 45 | | | | |

Sumber: Data diolah 2022

Dalam tabel 1. Hasil analisis statistik deskriptif sebagai berikut:

1. Nilai mean untuk variabel sistem pengendalian internal adalah sebesar 2.6667 dan nilai standar deviasi adalah sebesar 0.56408. Dan nilai minimum dan maximum masing-masing adalah 2 dan 4.
2. Nilai mean untuk variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi adalah sebesar 2.6000 dan nilai standar deviasi adalah sebesar 0.53936. Dan nilai minimum dan maximum masing-masing adalah 2 dan 4.
3. Nilai mean untuk variabel kompetensi SDM adalah sebesar 2.5333 dan nilai standar deviasi adalah sebesar 0,58775. Dan nilai minimum dan maximum masing-masing adalah 1 dan 4.
4. Nilai mean untuk variabel kualitas laporan keuangan adalah sebesar 2.8667 dan nilai standar deviasi adalah sebesar 0.50452. Dan nilai minimum dan maximum masing-masing adalah 2 dan 4.

B. Uji Normalitas

Tabel 2 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov :

| | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------|
| N | | 45 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 1.09818842 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .119 |
| | Positive | .072 |
| | Negative | -.119 |
| Test Statistic | | .119 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .122 ^c |

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan bahwa hasil uji normalitas dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar (0,122 > 0,05) artinya variabel dalam penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal.

C. Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolonieritas

Tabel 3 Uji Multikolonieritas

| Model | | Tolerance | VIF |
|-------|-----------------|-----------|-------|
| 1 | (Constant) | | |
| | SPI | .567 | 1.763 |
| | Pemanfaatan SIA | .607 | 1.648 |
| | Kompetensi SDM | .915 | 1.093 |

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 3 diatas, hasil pengujian menunjukkan bahwa:

1. Nilai *Tolerance* variabel Sistem Pengendalian Internal = 0,567 > 0,1 dengan nilai VIF = 1,763 < 10 sehingga variabel Sistem Pengendalian Internal dinyatakan bebas gejala multikolinieritas.
2. Nilai *Tolerance* variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi = 0,607 > 0,1 dengan nilai VIF = 1,648 < 10 sehingga variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dinyatakan bebas gejala multikolinieritas.
3. Nilai *Tolerance* variabel Kompetensi SDM = 0,915 > 0,1 dengan nilai VIF = 1,098 < 10 sehingga variabel Kompetensi SDM dinyatakan bebas gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4 Uji Heteroskedastisitas

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|-------|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 1.406 | .979 | | 1.436 | .159 |
| | SPI | -.011 | .097 | -.024 | -.117 | .907 |
| | Pemansaan SIA | -.008 | .093 | -.017 | -.085 | .933 |
| | Kompetensi SDM | -.043 | .089 | -.078 | -.482 | .632 |

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 4 diatas hasil pengujian menunjukkan bahwa:

1. Nilai *Sig.* Variabel Sistem Pengendalian Internal = 0,907 > 0,05 sehingga variabel penelitian Sistem Pengendalian Internal dinyatakan bebas dari heterokedastisitas.
2. Nilai *Sig.* Variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi = 0,933 > 0,05 sehingga variabel penelitian Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dinyatakan bebas dari heterokedastisitas.
3. Nilai *Sig.* variabel Kompetensi SDM = 0,632 > 0,05 sehingga variabel penelitian Kompetensi SDM dinyatakan bebas dari heterokedastisitas.

D. UJI HIPOTESIS

Tabel 5 Uji Hipotesis

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized | t | Sig. |
|-------|-----------------|-----------------------------|------------|--------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Coefficients | | |
| 1 | (Constant) | 2.660 | 1.656 | | 1.606 | .116 |
| | SPI | .374 | .164 | .351 | 2.285 | .028 |
| | Pemanfaatan SIA | .407 | .158 | .382 | 2.573 | .014 |
| | Kompetensi SDM | .056 | .151 | .045 | .370 | .713 |

*F*_{hitung} = 11,264
Sig. *F* = 0,000^a
R Square = 0,452
Adj. R Square = 0,412

Sumber: Data diolah 2022

PEMBAHASAN

Uji F (Simultan)

Berdasarkan tabel 5 diatas menyatakan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai *F*_{hitung} = 11,264 dengan *Sig.* *F* 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05 maka *H*₁ diterima *H*₀ ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang.

Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan tabel 5, Nilai *R square* sebesar 0,452. Hal ini menunjukkan bahwa 45% variabel Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang. Sedangkan 55% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji t (Parsial)

Dari tabel 5, dapat diketahui hasil pengujian hipotesis secara parsial yaitu:

H1 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 5, variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai t sebesar 2,285 dengan signifikan sebesar 0,028. Karena $\text{sig. } t < 5\%$ ($0.028 < 0,050$), maka H_0 ditolak H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang. Hal ini dikarenakan Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberi keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan suatu pemerintah daerah yang tercermin dari keteladanan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya perundang-undangan.

H2 : Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 5, variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi memiliki nilai t sebesar 2,573 dengan signifikan sebesar 0,014. Karena $\text{sig. } t < 5\%$ ($0.014 > 0,050$), maka H_0 ditolak H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang. Hal ini dikarenakan Sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah suatu sistem pengelompokan, pencatatan, dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan.

H3 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 5, variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai t sebesar 0,370 dengan signifikan sebesar 0,713. Karena $\text{sig. } t > 5\%$ ($0.713 > 0,050$), maka H_0 diterima H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kompetensi sumber daya manusia maka tugas mengenai administrasi keuangan dan fungsinya serta hambatan di dalam pengolahan data juga dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang harus diselesaikan, salah satunya adalah penyajian laporan keuangan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 45 responden yang sesuai kriteria sampel dan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Sampang.
2. Variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Sampang.
3. Variabel kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Sampang.

Saran

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan sampel yang lebih banyak sehingga memperoleh hasil yang lebih baik.
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambah variabel lain yang digunakan untuk mengetahui kualitas laporan keuangan daerah.
3. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya agar dapat menambah lebih banyak referensi seperti literatur dari luar negeri.

Daftar Pustaka

- Sugiyono (2017) *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Hanifa, Lia (2016) "Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan", *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, 2016
- Meuthia, Reno Fithri dan Endrawati (2008) Pengaruh Faktor Pendidikan, Pelatihan, Pengalaman Kerja dan Penguasaan Komputer Staf Bagian Akuntansi terhadap Kualitas Penyajian Informasi Akuntansi. (Studi Pada Kantor Cabang Bank Nagari). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* Vol 3 No. 1 Juni 2008 ISSN: 1858: 3687.
- Mulia, Rizki Afri (2016) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal El-Riyasah*, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2018
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem pengendalian internal
- Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal
- Pradono dan Basukianto (2015) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 2015
- Pramudityo, B (2017) Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
- Sutrisno (2017) *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*
- Udiyanti dkk, (2014) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No:1 Tahun 2014)*
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Yuliani, Nur Laila dan R Dwi Agustini (2016) Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 14 (1), 56-64.

Website:

<https://jatim.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/05/25052022-Siaran-Pers-Penyerahan-LHP-LKPD-Provinsi-Jawa-Timur-TA.-2021.pdf>